

## **STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS POTENSI LOKAL DI GAMONG PULAU KAYU KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**Safrida<sup>1\*</sup>, Nila Safrida<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

\*safrida1290@utu.ac.id

**Abstrak:** Kondisi kehidupan nelayan tradisional di Desa Pulau Kayu identik dengan ekonomi yang rentan dan berpendapatan rendah sehingga memerlukan upaya penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memetakan kendala yang dihadapi kelompok usaha perempuan dalam memanfaatkan potensi lokal di Desa Pulau Kayu serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Mitra utama pengabdian ini adalah 30 orang anggota Kelompok Usaha Perempuan "Sepakat" sebagai komunitas masyarakat pesisir. Metode pengabdian yang digunakan berkonsep CBR (*Community-Based Research*). Hasil Program pengabdian ini berhasil memetakan kendala-kendala dalam pengembangan Kelompok Usaha Perempuan "Sepakat" di Desa Pulau Kayu mulai dari tidak stabilnya jumlah produksi, minimnya modal usaha, belum adanya kerjasama dan pendampingan dari pemerintah, kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberdayaan perempuan yang berbasis potensi lokal, dan inovasi produk usaha yang terbatas. Program pengabdian mampu memecahkan kendala tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal berbasis perempuan melalui program bantuan modal usaha, peningkatan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan kelompok usaha perempuan dan pelaksanaan pelatihan pengolahan produk serta keuangan agar usaha kelompok perempuan "Sepakat" dapat berkembang lebih baik. Namun demikian program pengabdian kepada masyarakat ini memerlukan evaluasi dan monitoring pemerintah secara berkala agar hasil positif kegiatan ini dapat memberikan dampak yang berkelanjutan serta mampu menaikkan taraf hidup kelompok usaha perempuan "Sepakat" dan masyarakat pesisir di Desa Pulau Kayu.

**Kata Kunci:** pemberdayaan perempuan, peningkatan ekonomi, kelompok usaha, masyarakat pesisir

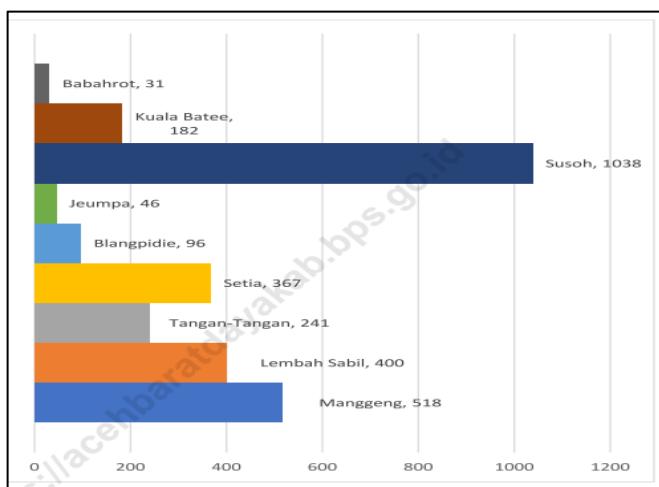
**Abstract:** *Traditional fishermen in Pulau Kayu Village experience vulnerable and low-income economic situations; therefore, initiatives to enhance the economy through women's empowerment are required. This community service program aimed to identify and remove barriers preventing women's business groups from taking advantage of local resources in Pulau Kayu Village. The participants of this program were 30 members of the women's Business Group "Sepakat". The method used was CBR (Community-Based Research). The result shows that the program succeeds in identifying the challenges or impediments to the growth of women's business groups in Pulau Kayu Village, starting with the erratic production levels, the lack of business capital, the absence of government cooperation and support, the government's lack of focus on empowering women based on local potential, and the restricted innovation of business products. This community service program can solve these obstacles to optimize the utilization of women-based local potential by helping business capital, increasing government involvement in women's business group activities and conducting product processing and financial training so that the women's business group "Sepakat" can develop further. Regular evaluation and monitoring by the government are needed so that the positive results of this service program can have a sustainable impact and improve the standard of living of the "Sepakat" women's business group and the community in Pulau Kayu Village.*

**Keywords:** *women's empowerment, economic improvement, business groups, coastal society,*

### **Pendahuluan**

Daerah Barat-Selatan Aceh telah lama dikenal dengan potensi bahari dan maritimnya

yang melimpah. Daerah tersebut meliputi wilayah kabupaten Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil hingga Aceh Barat Daya. Sebagai salah satu sentral perdagangan hasil laut Aceh Barat Daya memiliki peran dan posisi strategis dengan letak astronomi antara  $3^{\circ} 34'24''$  dan  $4^{\circ}05'37''$  Lintang Utara dan  $96^{\circ}34'57''$  dan  $97^{\circ}09'19''$  Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai  $1.88.05 \text{ km}^2$ , dan jumlah penduduk sekitar 152.811 jiwa (BPS Aceh Barat Daya, 2022). Membaca potensi kelautan dan perikanan di Aceh Barat Daya, bisa terlihat dari produksi perikanan laut sebesar 94,39% dari total produksi perikanan serta tingginya jumlah penduduk bermata pencaharian nelayan yaitu sekitar 2.719 orang. Dimana Kecamatan Susoh menjadi pendominasi masyarakat nelayan sebesar 47,02% atau 1.038 orang sebagaimana [Grafik 1](#).



**Grafik 1.** Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan Tahun 2021. Sumber: *Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Daya* (BPS Aceh Barat Daya, 2022)

Menempati kecamatan dengan profesi nelayan terbanyak, Kecamatan Susoh memiliki beberapa desa yang menggiatkan usaha bidang perikanan dan kelautan sebagai ranah pemanfaatan potensi lokal berbasis perikanan, salah satunya ialah Desa Pulau Kayu ([Gambar 1](#)). Desa Pulau Kayu merupakan salah satu dari 152 desa di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan potensi sumber daya ikan yang melimpah. Sebagai lokasi potensial, berbagai aktivitas kelautan dan perikanan seolah tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Pulau Kayu. Namun, dalam berbagai aktivitas tersebut, khususnya pengolahan hasil laut, keterlibatan perempuan desa masih minim. Nelayan di Pulau Kayu maupun Kecamatan Susoh didominasi oleh nelayan kecil dengan pendapatan rendah dan tidak menentu. Sehingga faktor inilah yang secara langsung menjadi penyebab tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya menyentuh angka 24,21 ribu orang dan kondisi ini diperparah dengan merebaknya pandemi Covid-19 (BPS Aceh Barat Daya, 2022). Dengan jumlah penduduk miskin yang meningkat dan kondisi ekonomi nelayan yang rendah, mengakibatkan kebutuhan rumah tangga keluarga tidak selalu dapat terpenuhi. Hal ini merupakan dampak dari ketidakstabilan perekonomian masyarakat pesisir yang memberikan kerugian besar bagi nelayan khususnya di masa pandemi Covid-19, dan menjadi pemicu nelayan berhutang hingga terlilit hutang (Kholis et al., 2020).



**Gambar 1.** Lokasi Desa Pulau Kayu

Melihat kondisi tersebut, tentu upaya bersama untuk menguatkan ekonomi keluarga nelayan di perlukan. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seolah tak dapat digantungkan hanya pada kepala keluarga keluarga nelayan jika ditilik berdasarkan kondisi saat ini. Sehingga pelibatan para kaula perempuan seperti istri dan perempuan nelayan menjadi suatu keperluan untuk mengoptimalkan potensi lokal di Desa Pulau Kayu meski menghadapi pandemi. Kondisi pandemi nyatanya memang mempengaruhi berbagai sektor secara negatif tetapi pada sektor pertumbuhan akuakultur termasuk perikanan justru menunjukkan sisi positif dengan menciptakan ruang pertumbuhan biota laut bersifat berkelanjutan (Froehlich et al., 2021). Oleh sebab itu pemanfaatan hasil laut dengan maksimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hasil laut diperlukan termasuk perempuan. Keterlibatan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga tak dapat dianggap remeh. Sebab menurut penelitian (Derman, 2016), wanita yang memiliki pekerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menambah penghasilan pada keluarganya. Demi mendukung posisi perempuan dalam menguatkan ekonomi keluarga, pengembangan skill dan pembentukan kelompok usaha diperlukan, hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan sebenarnya dapat didefinisikan sebagai program yang melibatkan masyarakat kurang berkembang dan identik dengan kondisi ekonomi rendah untuk terlibat dalam proses pengayaan atau pemberdayaan dengan tujuan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat sebagai bentuk pembangunan (Faidati & Khozin, 2021). Mengenai konsep dalam pemberdayaan itu sendiri Craig dan Mayo dalam (Sutarto, 2018) menyebutkan apabila suatu program pemberdayaan harus memiliki sisi pengembangan, dan memuat konsep pemerataan (*equity*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*) dan kemandirian(*self help*).

Kegiatan pemberdayaan tentunya dapat memfokuskan objek sasaran pemberdayaan, dimana kalangan perempuan bisa menjadi sasaran utama. Pentingnya pelaksanaan pemberdayaan sebenarnya telah diuraikan dalam pasal 26 ayat 5 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: "Kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan

berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional". Oleh sebab itu aktivitas pemberdayaan pada perempuan merupakan hal yang sangat perlu untuk diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian (Zuraidah & Saunabella, 2018) dengan fokus peran istri dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Aceh Barat Daya. Istri yang berkegiatan produktif atau bekerja berkontribusi sebanyak 35,18% pada pendapatan keluarga. Tetapi dalam penelitian tersebut jenis pekerjaan yang digeluti para istri nelayan belum dikaitkan dengan pemanfaatan potensi lokal di lokasi penelitian. Pekerjaan para istri nelayan hanya berupa buruh cuci, penjual kue, penjahit, membuka kios, penjaga anak dan peternak. Bisa dikatakan selama ini pemberdayaan perempuan berbasis potensi lokal terutama perikanan masih sangat minim dilakukan. Bahkan hasil penelitian (Ratnasari et al., 2021) menerangkan jika program pemberdayaan pada perempuan masih belum diterapkan secara rutin dan benar di daerah terpencil maupun pedesaan, akibatnya perempuan sering kali tidak terberdayakan dengan baik. Dari kedua penelitian tersebut telah jelas memperlihatkan jika pemberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga menjadi peran yang strategis, akan tetapi pemberdayaan perempuan yang dilakukan untuk saat ini masih sangat minim, padahal menjadi kunci dari permasalahan.

Program pemberdayaan perempuan, bisa melibatkan masyarakat perempuan secara umum maupun unit atau kelompok usaha yang berbasis perempuan. Seperti kelompok usaha sepakat di Desa Pulau Kayu. Kelompok usaha sepakat merupakan kelompok usaha milik masyarakat Desa Pulau Kayu yang bergerak dalam bidang pengolahan dan produksi ikan asin. Kelompok ini beranggotakan perempuan Gampong Pulau Kayu dan menjadi bagian dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK Gampong. Keberadaan kelompok usaha sepakat dimaksudkan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah atau bisa dikatakan masyarakat miskin. Pengoperasian unit usaha tersebut murni melibatkan desa dari penggunaan bahan baku hingga pekerja.

Namun, permasalahan justru terjadi ketika kelompok usaha sepakat belum memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan di Desa Pulau Kayu. Disebabkan masih tradisionalnya proses pengolahan produk, minimnya inovasi atau keterbaruan pada produk olahan, belum maksimalnya keterlibatan perempuan-perempuan desa dalam kelompok usaha, terbatasnya modal, pemasaran hingga persaingan antar kelompok usaha lain. Permasalahan yang muncul bahkan sesuai dengan pandangan (Guerramarrero et al., 2021) yang menyebutkan jika keterbatasan pemasaran nelayan artisanal atau nelayan kecil menjadi sebab pendapatan nelayan turun sekitar 40% dari biasanya. Berdasarkan kondisi kelompok usaha sepakat sebagai objek pengabdian sangat membutuhkan pemberdayaan dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

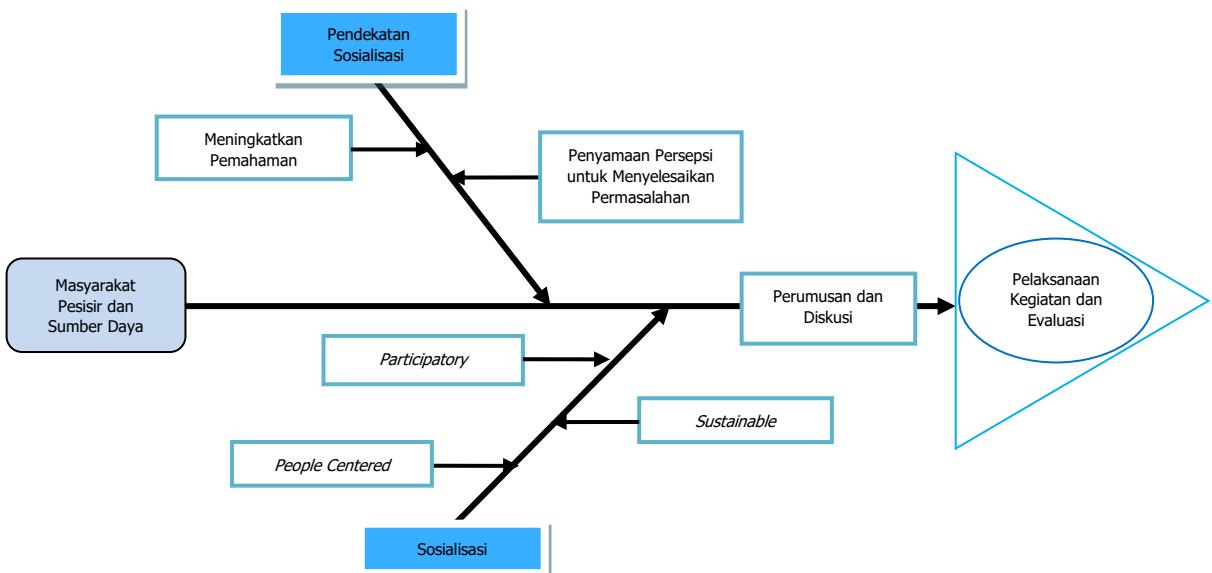
Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memetakan kendala yang dihadapi kelompok usaha perempuan "Sepakat" sebagai kelompok

usaha perempuan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan potensi lokal di Desa Pulau Kayu, dan mengatasi kendala tersebut melalui program-program pemberdayaan (pengabdian), sehingga pemanfaatan potensi lokal oleh perempuan dapat terlaksana dengan maksimal.

## Metode

Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah CBR (*Community-Based Research*), dengan melihat potensi maupun persoalan yang dialami masyarakat, untuk kemudian mencari pemecahan masalah sebagai solusi berupa rumusan teknis penyelesaian persoalan masyarakat, termasuk masalah yang terkadang tidak disadari oleh para masyarakat, dengan tujuan mencapai kemajuan serta perubahan (Banks, 2012). Bentuk pengabdian awal yang dilakukan melibatkan anggota kelompok usaha perempuan masyarakat pesisir "Sepakat" sebagai mitra utama berjumlah 30 orang, yang menjadi objek sasaran pemberdayaan (pengabdian), dengan Tim riset keilmuan Universitas Teuku Umar sebanyak 10 orang sebagai pelaksana. Selain itu, juga mengikutsertakan stakeholder dari pemerintahan setempat yang memiliki fungsi strategis terkait penyelesaian masalah kelompok usaha di Pulau Kayu, meliputi Kechik (Kepala Desa) Pulau Kayu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DMP4) Kabupaten Aceh Barat Daya. Target capaian dari kegiatan sosialisasi ini inilah terpetakan program-program yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan pengabdian.

Dalam metode CBR, aktivitas pengabdian, penelitian, dan penggalian informasi lebih lanjut tentang suatu fenomena sosial bukanlah hal yang ditekankan, tetapi yang menjadi fokus ialah pada upaya perumusan gambaran tentang kebutuhan masyarakat, berlandaskan pada hasil pengamatan yang dilakukan (Pasick et al., 2010). Tahap awal pengabdian ini terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana yang tergambar pada [Bagan 1](#) berikut.



**Bagan 1.** Kerangka Proses Pelaksanaan Sosialisasi

Berdasarkan penampakan [bagan 1](#), penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Semulanya kegiatan dasar rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi dilakukan setelah tim pengabdi melakukan pemetaan kondisi masyarakat pesisir dan potensi sumberdaya yang dimiliki Desa Pulau Kayu. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan arah pengembangan basis pengabdian yang harus difokuskan dan diprioritaskan dalam penyusunan program pemberdayaan kedepannya
2. Pendekatan sosialisasi: Dalam pendekatan pelaksanaan sosialisasi, penyamaan persepsi antara masyarakat dan tim pengabdi menjadi hal urgen, sebab menjadi titik penting program bisa terlaksana dan bisa diterima baik oleh masyarakat. Setelah persepsi telah sejalan, maka pemahaman dan edukasi pemberdayaan akan lebih mudah disalurkan, sehingga secara langsung meningkatkan pemahaman masyarakat Pulau Kayu dan terkhusus kelompok usaha sepakat yang disosialisasikan dengan tujuan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Desa Pulau Kayu.
3. Sosialisasi: Unsur dalam pelaksanaan sosialisasi berpegang pada nilai pembangunan, sesuai dengan teori Robert Chambers dalam ([Alfitri, 2011](#)) mengenai Konsep paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) dan *sustainable* (berkelanjutan). Sehingga berbagai program yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdi akan berlandaskan pada indikator tersebut.
4. Dalam pelaksanaan sosialisasi, interaksi antara masyarakat, stakeholder dan tim pengabdi adalah kunci utama. Dimana pada tahap ini akan dirumuskan berbagai program yang akan diimplementasikan secara aktif nantinya di lingkungan masyarakat Pulau Kayu terkhusus pada kelompok usaha sepakat.
5. Hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ialah terumusnya berbagai usulan yang perlu diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa, maupun kelompok usaha di Desa Pulau Kayu. Implementasi tersebut merupakan output awal dari pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan dalam proses diskusi saat sosialisasi berlangsung yang akan diikuti tahap evaluasi terhadap program.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan adalah awal dari program pengabdian Riset Keilmuan yang diselenggarakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan RI (LPDP-RI) yang nantinya akan dilaksanakan selama satu tahun dengan 6 bulan pertama melibatkan mahasiswa secara langsung dan akan terus berlangsung hingga 12 bulan. Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran program, nilai dan konsep pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan tetap menerima berbagai masukan dari pihak stakeholder serta masyarakat kelompok usaha yang terlibat dalam program pengabdian. Realisasi program pengabdian telah dilakukan sejak 1 bulan lalu yaitu akhir Januari 2022 dan

akan berlangsung hingga juli mendatang. Sehingga dalam hal ini tim pengabdi telah melakukan pemetaan kondisi masyarakat dan potensi lokal yang dimiliki di Desa Pulau Kayu dengan ikut terlibat dalam kegiatan kelompok usaha dan masyarakat seperti yang terlihat pada [Gambar 2](#).



**Gambar 2.** Mahasiswa Tim Pengabdian Ikut dalam Kegiatan Kelompok Usaha Sepakat

Keterlibatan mahasiswa sebagai tim pengabdi dalam aktivitas usaha kelompok sepakat dimaksudkan untuk membantu, mendengarkan, merasakan langsung praktik sistem kerja kelompok usaha dan mengetahui kendala maupun masalah yang dialami kelompok usaha tersebut. Terkait kegiatan sosialisasi sebagai awal program pengabdian telah dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 seperti yang terlihat pada [Gambar 3](#).



**Gambar 3.** Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui beberapa sesi atau tahapan. Pelaksanaan program sosialisasi program pemberdayaan perempuan melalui pengembangan potensi lokal di Desa Pulau Kayu terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yang bisa dilihat pada [Tabel 1](#).

**Tabel 1.** Tahapan Program Sosialisasi Pemberdayaan di Gampong Pulau Kayu

No.	Kegiatan	Narasumber	Jabatan
1	Penyampaian program kegiatan pengabdian	Dr. Afrizal Tjoetra	Ketua Tim Pengabdian
2	Pidato mengenai program pemberdayaan	Hamdani, SE	Sekcam Kec. Susoh
3	Penyampaian kegiatan mahasiswa	Mahasiswa	Tim Pengabdi
4	Penyampaian kondisi masyarakat, potensi dan keluhan yang dihadapi kelompok usaha	Agus Lan	Kepala Desa (Keuchik) Desa Pulau Kayu
5	Diskusi mengenai rencana program pengabdian antara Tim Periset, keuchik Desa Pulau Kayu, Sekcam Kecamatan Susoh, Sekretaris DPMP4 Susoh dan masyarakat	Hamdani, SE, Jufrizal, dan tim pengabdi	Sekcam Kec. Susoh dan Sekretaris DPMP4 Kab. Abdy

Sumber: Data Olahan Penelitian

Didasarkan pada tabel tahapan kegiatan sosialisasi dapat dideskripsikan sebagai sesi pemberian penjelasan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdi di desa. Tujuan program yaitu untuk ikut andil membangun masyarakat dengan objek utama para perempuan, serta output yang diharapkan dari program ialah memberi manfaat langsung bagi masyarakat maupun pada dunia akademisi. Seperti pelaksanaan pelatihan kewirausahaan (pengolahan produk, kemasan, pemasaran dan promosi) dengan melibatkan tenaga profesional, penyusunan buku ajar hingga penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan pelaksanaan program pengabdian berbasis riset tersebut.

### **Kendala yang dihadapi kelompok usaha**

Diskusi yang dilakukan menyuarakan beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kendala selama ini dihadapi kelompok usaha sejak awal masyarakat dalam mengembangkan usaha. Kendala yang ada tentu akan menghambat keberlangsungan dan perkembangan kelompok usaha sejak awal yang berbasis perempuan di Desa Pulau Kayu. Kendala tersebut dapat diuraikan dalam beberapa poin, diantaranya: Pertama, tidak stabilnya jumlah produksi produk usaha. Hal ini terjadi diakibatkan jumlah hasil tangkapan ikan antar musim yang sangat berbeda. Dimana ketika musim ikan melimpah produk yang dihasilkan dengan kuantitas banyak tetapi harga produk cenderung murah dan sebaliknya. Ketika musim ikan tidak melimpah maka produksi tak dapat dilakukan, sebab harga ikan yang melambung tinggi, sehingga kelompok usaha tidak bisa menjalankan usaha dan akhirnya usaha tersebut terhenti tanpa penghasilan. Melihat hal ini ([Dorji et al., 2022](#)) membantarkan apabila keterbatasan sumberdaya perikanan dan kelautan menjadi faktor yang mengancam

keberlanjutan industri perikanan laut. Padahal industri perikanan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Pulau Kayu seperti industri skala kecil kelompok usaha sepakat.

Kedua, minimnya modal usaha. Modal memang menjadi hal terpenting dalam membangun usaha, modal usaha bukan hanya diperlukan ketika awal pembentukan usaha. Tetapi juga ketika pendapatan usaha tak mampu mencukupi jumlah produksi yang ditargetkan. Sebenarnya masalah terkait modal usaha atau modal finansial telah menjadi salah satu masalah utama dalam menjaga keberlangsungan usaha seperti yang disebutkan (Kimani et al., 2020). Modal usaha pada kelompok sepakat sebagian besar berasal dari dana desa, tetapi ketika pandemi merebak. Dana untuk menjalankan usaha tersebut harus disalurkan bagi penanggulangan Covid-19, maka pemangkasan modal usaha terjadi. Akibatnya produksi hanya akan dilakukan ketika usaha memiliki dana yang cukup. Hal ini perlu diatasi terutama ketika harga ikan sebagai bahan baku produksi tinggi agar keberadaan usaha dapat terjaga.

Ketiga, belum ada kerjasama dan pendampingan pada kelompok usaha sepakat yang dilakukan pemerintah. Sejatinya pemerintah menjadi pendorong utama kemajuan kelompok usaha, namun selama ini dalam menjalankan usaha. Kelompok usaha sepakat merasakan kontribusi dari pemerintah masih minim dalam membantu pengembangan usaha. Pendampingan pemerintah dalam membantu dan mengedukasi kelompok usaha baik dalam pengolahan produk maupun pengelolaan keuangan nyatanya belum terlihat. Mendukung pentingnya pendampingan maupun edukasi bagi nelayan maupun kelompok usaha, (Hossain et al., 2021) menyebutkan edukasi pengelolaan pendapatan yang sesuai dengan kondisi usaha masyarakat disaat pandemi adalah hal penting untuk dilakukan sehingga haruslah memuat nilai efisiensi sebab kesulitan keuangan turut mempengaruhi kemampuan usaha memenuhi kebutuhan.

Keempat, pemerintah belum berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan potensi lokal. Berdasarkan hasil pengamatan, pemberdayaan perempuan yang dimaksudkan hanya pada lingkup pemberdayaan perempuan terkait perlindungan khususnya pada tindak kekerasan rumah tangga atau sejenisnya. Maka fokus pemberdayaan perempuan yang diusahakan kelompok usaha "sepakat" belum mendapat respon dan dukungan khusus pemerintah, sehingga melalui pengabdian ini prospek pandangan baru akan keberadaan perempuan dapat menjadi terobosan yang efektif. Kelima, inovasi produk usaha yang masih terbatas. Produk yang dihasilkan kelompok usaha sepakat Desa Pulau Kayu hanya berupa produk ikan asin atau belum bervariasi. Pengolahan produk dari tahap awal hingga *packaging* masih secara tradisional seperti pada [Gambar 4](#).



**Gambar 4.** Pengemasan produk ikan asin yang sederhana

Pengolahan secara tradisional tentu memanfaatkan panas matahari sebagai media pengeringan ikan, sehingga jumlah produksi seringkali tidak menentu bahkan terbatas akibat bergantung pada kondisi cuaca. Variasi produk olahan kelompok usaha juga belum ada selain ikan asin, diikuti belum adanya pemasaran dan pengenalan usaha secara digital/online, padahal menurut (Varadarajan et al., 2021) pemasaran online menjadi media komunikasi yang mendominasi promosi dan pengenalan produk usaha. Sehingga pangsa produk kelompok usaha sepakat masih sempit dengan persaingan sangat ketat. Selain itu keunikan produk usaha belum muncul yang sebenarnya dapat menjadi daya tarik utama atau ikon dari produk kelompok usaha sepakat Desa Pulau Kayu.

### **Pemecahan atas kendala kelompok usaha**

Berdasarkan beberapa kendala dihadapi kelompok usaha sepakat Desa Pulau Kayu dalam menjalankan usaha dan mengoptimalkan pemberdayaan pada perempuan. Maka dapat diuraikan beberapa program sebagai upaya pemecahan akan masalah didasarkan hasil diskusi pada kegiatan sosialisasi melibatkan pihak pemerintah yaitu Hamdani, SE sebagai Sekretaris Kecamatan Susoh, Sekretaris DPMP4 Kecamatan Susoh dan tim pengabdian Universitas Teuku Umar Serta masyarakat sebagai objek utama.

Program yang dilaksanakan ialah efektivitas produksi ikan asin dimasa hasil tangkapan ikan melimpah, agar mencukupi kebutuhan pasar saat harga ikan tinggi, di musim hasil tangkapan menyusut. Hal ini dilakukan agar usaha tetap beroperasi meski ikan tidak melimpah dan memiliki harga tinggi. Pernyataan ini didukung oleh (Dorji et al., 2022) dimana ketika jumlah hasil produksi dinaikkan 10% pada masa tertentu dapat mengurangi 2% masalah saat produksi menurun. Namun meski demikian, harga produk ditargetkan harus tetap konstan meski harga ikan mahal maupun murah, agar kondisi pasar dan keuntungan usaha stabil. Selanjutnya apabila usaha telah kuat secara ekonomi dan pendapatannya stabil maka pembelian mesin pembeku sesuai skala usaha yang dapat menjaga kualitas ikan dalam jangka panjang bisa dilakukan. Sebab seperti yang dinyatakan (Siahainenia et al., 2018) bahwa keberadaan faktor produksi berupa mesin pembeku dapat menunjang efisiensi proses produksi produk perikanan secara maksimal (*fully utilized*). Ketika tangkapan ikan melimpah

atau melebihi keperluan akan bahan baku, ikan tersebut dapat disimpan untuk menyesuaikan kebutuhan jumlah produksi kedepannya. Hal ini diperlukan untuk menyiasati kendala pemukiman ikan. Keberadaan mesin pembeku bagi kelompok usaha yang belum mapan dapat diusahakan dengan mengajukan permohonan pada dinas terkait seperti dinas perikanan dan ilmu kelautan atau pihak lain yang sekiranya bisa memfasilitasi.

Minimnya modal usaha juga menjadi kendala. Hasil diskusi pada saat sosialisasi memberikan sumbangsih pemikiran untuk bisa meluaskan bantuan modal bagi kelompok usaha yang membutuhkan. Diakibatkan sumber dana kelompok usaha sepakat yang sebelumnya berasal dari dana desa dan harus terpangkas akibat kebijakan mengenai Covid - 19. Melalui program pengabdian juga diberikan bantuan usaha bagi kelompok usaha perempuan berupa bantuan bahan baku, pelatihan pengolahan produk, dan pengelolaan keuangan. Disarankan pula masyarakat juga berusaha mengajukan permohonan bantuan pada pemerintah secara mandiri. Selain itu, ketika pendapatan kelompok usaha telah stabil, pembentukan koperasi antar kelompok usaha juga bisa dilakukan sebagai wadah kerjasama dalam membantu modal usaha kelompok usaha lainnya. Baik koperasi modal barang/alat maupun modal keuangan tanpa bunga dengan perjanjian mengikat. Peran koperasi bisa memberikan dampak besar dan tak bisa disepelekan sebab berdasarkan penelitian (Ghauri et al., 2021), koperasi memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya dibalik manfaat memudahkan penyebaran informasi, pengetahuan, jaringan dan dukungan usaha sehingga mampu bertindak sebagai penyedia sumber dana eksternal ketika ketidakstabilan pada kelompok usaha/UKM terjadi. Oleh sebab itu, penerapan rancangan tersebut perlu diterapkan, karena untuk saat ini belum ditemui adanya pengajuan bantuan modal usaha secara nyata dari kelompok usaha diikuti belum terdapat koperasi dengan fungsi optimal di Desa Pulau Kayu.

Belum adanya kerjasama dan pendampingan pada kelompok usaha sepakat yang dilakukan pemerintah menjadi kendala yang perlu di prioritaskan. Hal ini dikarenakan keterlibatan pihak pemerintah menjadi bukti keseriusan dalam meningkatkan ekonomi dan mendukung pemberdayaan pada kelompok usaha. Sebagaimana yang disampaikan (Aini, 2020), jika pemerintah memiliki posisi strategis dalam memperluas dan memperbaiki kapasitas masyarakat nelayan atau pesisir untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil diskusi saat sosialisasi, pihak pemerintah mengusulkan agar kelompok usaha mengajukan usulan bina usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Untuk menjadi kelompok usaha binaan kedinasan, sehingga melalui program pengabdian ini kemitraan usaha kelompok perempuan terbangun. Apabila pengusulan bantuan disetujui, nantinya pemerintah akan memantau dan membina secara aktif kelompok usaha tersebut. Sehingga kelompok usaha dapat dikembangkan, akibat keterlibatan pemerintah dan bisa memberi *outcome* maksimal bagi masyarakat terkhusus anggota kelompok usaha.

Dewasa ini, pemerintah nyatanya juga masih belum terlalu berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan potensi lokal. Pemberdayaan perempuan

hanya pada upaya menjadikan perempuan memiliki keahlian khusus yang bersifat umum, seperti menjahit, memasak atau semacamnya. Bahkan kelimpahan sumberdaya yang ada pada negara berkembang malah menjadikan lapangan pekerjaan bagi perempuan berkurang, akibatnya ketidaksetaraan gender dan meningkat pesatnya jumlah kelahiran (Aowa et al., 2021). Sebenarnya dengan melimpahnya sumber daya yang dimiliki Aceh Barat Daya seperti di Desa Pulau Kayu bisa di optimalkan potensinya untuk kemaslahatan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan yang difokuskan pada pengkolaborasian antara potensi lokal dan peranan perempuan. Disinilah keterlibatan akademisi sebagai pihak yang bisa mengubah pandangan mayoritas masyarakat, termasuk fokus pemerintah dalam pemberdayaan perempuan di Desa Pulau Kayu diperlukan. Hal ini perlu digaungkan, agar perempuan dapat diberdayakan dengan maksimal dan pemerintah bisa melihat dari berbagai sudut pandang tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga. Bukan hanya menjadikan perempuan sebagai fokus serta objek yang senantiasa diamati dalam masalah kekerasan atau semacamnya.

Selain masalah yang telah disebutkan, ternyata inovasi produk yang terbatas pun menjadi kendala bagi perkembangan kelompok usaha sepakat. Inovasi produk yang hanya berupa ikan asin, berdasarkan hasil diskusi harusnya divariasikan dengan melibatkan pihak profesional berupa pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh tim pengabdian dan pemerintah setempat. Produk ikan asin yang sebelumnya bergantung pada cuaca dapat diupayakan menggunakan metode atau alat produksi yang mendukung kegiatan usaha tanpa terkendala oleh cuaca. Kerjasama antara kelompok usaha dan pihak pemberi pelatihan nanti juga bisa dilakukan agar melahirkan produk inovasi baru yang dapat menjadi ikon kelompok usaha sepakat.

## **Kesimpulan**

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan berhasil memetakan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pulau kayu, khususnya Kelompok Usaha Perempuan "Sepakat" yang dapat dikategorikan sebagai kendala. Berdasarkan beberapa kendala yang disebutkan sebelumnya seperti tidak stabilnya jumlah produksi produk usaha, minimnya modal usaha, belum ada kerjasama dan pendampingan dari pemerintah, fokus pemerintah akan pemberdayaan perempuan berbasis potensi masih sangat minim, dan inovasi produk usaha yang masih terbatas. Melalui program pemberdayaan yang dilakukan, pelaksanaannya telah mampu mendukung peningkatan taraf hidup dan memperbaiki kondisi ekonomi nelayan tradisional di Desa Pulau Kayu, baik dari bantuan modal, pelatihan, pengelolaan keuangan, upaya perluasan pemasaran dan kerjasama kemitraan dengan pemerintah yang telah diupayakan selama proses pengabdian. Oleh sebab itu, kemudian diperlukan evaluasi dan pemantauan berkala oleh pemerintah maupun pemerintah desa akan hasil positif pelaksanaan program pengabdian agar memberdayakan Kelompok Usaha Perempuan "Sepakat" khususnya dan masyarakat Desa Pulau Kayu umumnya secara berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

Terimakasih banyak kami ucapkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan RI (LPDP-RI) yang telah mendanai kegiatan riset keilmuan berbasis pengabdian ini. Terimakasih pada Bupati Aceh Barat Daya, Sekcam Kecamatan Susoh, DPMP4 dan seluruh kedinasan maupun masyarakat yang telah terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi. Terima Kasih pada masyarakat Desa Pulau Kayu, serta terkhusus pada Kelompok Usaha Sepakat yang telah menjadi sasaran utama pelaksanaan program pengabdian tim pengabdian Universitas Teuku Umar di tahun 2022 ini.

## Referensi

- Aini, K. (2020). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2020*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Alfitri. (2011). *Community Development*. Graha Ilmu.
- Aowa, P. A., Ondo, H. A., & Tabi, H. N. (2021). Women's Political Empowerment and Natural Resource Curse in Developing Countries. *Resources Policy*, 75 (102442). <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102442>
- Banks, S. (2012). *Community Based Participatory Research A Guide to Ethical Principles and Practice, Center for Social Justice and Community*. Durham University.
- BPS Aceh Barat Daya. (2022). *Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka*. BPS Aceh Barat Daya.
- Derman. (2016). *Peran Wanita Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Kendari*. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Dorji, N., Yamazaki, S., & Thinley, P. (2022). Productivity improvement to sustain small-scale fish production in developing countries: the case of bhutan. *Agriculture*, 548(1). <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737612>
- Faidati, N., & Khozin, M. (2021). Pemberdayaan Komunitas UMKM Bukalapak UNISA (Bu-Lisa) Di Era Pandemi Covid-19. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 2(1), 23–31. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v2i1.38>
- Froehlich, H. E., Gentry, R. R., Lester, S. E., Cottrell, R. S., Fay, G., Branch, T. A., Gephart, J. A., White, E. R., & Baum, J. K. (2021). Securing a sustainable future for US seafood in the wake of a global crisis. *Marine Policy*, 124. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104328>
- Ghauri, S., Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2021). Journal of Co-operative Organization and Management Why do SMEs join Co-operatives? A comparison of SME owner-managers and Co-operative executives' views. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 9(1), 100128. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2020.100128>
- Guerra-Marrero, A., Couce-Montero, L., Jiménez-Alvarado, D., Espino-Ruano, A., Núñez-González, R., Sarmiento-Lezcano, A., Del Pino, A. S., & Castro, J. J. (2021). Preliminary assessment of the impact of Covid-19 Pandemic in the small-scale and recreational fisheries of the Canary Islands, *Marine Policy*, 133. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104712>
- Hossain, M. T., Lima, R. T., Ela, Z. M., Khan, L., Ahmed, F., Shovo, T. A. A., Masud, A. A., Rahman, K. S., Jahan, N., Rahman, S. M., & Islam, M. N. (2021). Livelihood challenges and healthcare-seeking behavior of fishermen amidst the COVID-19 pandemic in the Sundarbans mangrove forest of Bangladesh. *Aquaculture*, 546(2022), 737348. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737348>
- Kholis, M. N., Fraternesi, & Wahidin, L. O. (2020). Prediksi Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang Di Kota Bengkulu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(1), 001–011. <https://doi.org/10.29244/core.4.1.001-011>
- Kimani, P., Wamukota, A., Manyala, J. O., & Mlewa, C. M. (2020). Analysis of constraints and opportunities in marine small-scale fisheries value chain: A multi-criteria decision approach.

- Ocean and Coastal Management, 189, 105151.  
<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105151>
- Pasick, R., Oliva, G., Goldstein, E., & Fleisher, P. (2010). *Community-Engaged Research with Community-Based Organizations*. UCSF CTSI Community Engagement Program, University of California.
- Ratnasari, S., Saripah, I., & Ahyadi, A. S. (2021). Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Kewirausahaan Menjahit di PKBM Bhina Swakarya. *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37126>
- Siahainenia, S. M., Bawole, D., & Talakua, E. G. (2018). Stabilitas Harga Ikan Di Kota Ambon Melalui Peran Cold Storage, Optimasi Produksi Dan Efisiensi Teknis. *Jurnal PAPALELE*, 2(2). <https://doi.org/10.30598/papalele.2018.2.2.74>
- Sutarto, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Perspektif Gender. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 267–283. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1473>
- Varadarajan, R., Welden, R. B., Arunachalam, S., Haenlein, M., & Gupta, S. (2021). Digital product innovation for greater good and digital marketing innovations in communications and channels, evolution, emerging issues, and future research direction. *International Journal of Research in Marketing*, 39(2), 482–501. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2021.09.002>
- Zuraidah, S., & Saunabella.TA, L. (2018). Peran Istri Nelayan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Istri Nelayan Di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Perikanan Terpadu*, 1(2). <https://doi.org/10.35308/.v1i2.799>